

# Studi Perbandingan Program Dana Pensiun DPLK dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai Alternatif Tabungan Jangka Panjang Masyarakat

Santi Theresia, Muhammad Abdul Muis<sup>2</sup>, Septian Odie Saputra, Suwardi<sup>4</sup>

Politeknik Bisnis dan Pasar Modal<sup>2,4</sup>

[santikunarjo@gmail.com](mailto:santikunarjo@gmail.com); [mam@bcm.ac.id](mailto:mam@bcm.ac.id), [septianodhie@gmail.com](mailto:septianodhie@gmail.com). [Suwardi@bcm.ac.id](mailto:Suwardi@bcm.ac.id)

## Abstrak

Dana pensiun merupakan salah satu instrumen keuangan yang berperan penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat pada masa pensiun, sehingga perencanaan keuangan jangka panjang menjadi kebutuhan yang semakin relevan. Di Indonesia, program dana pensiun diselenggarakan melalui berbagai skema, di antaranya Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang bersifat sukarela dan BPJS Ketenagakerjaan yang berfungsi sebagai bagian dari sistem jaminan sosial nasional melalui Program Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua.

Perbedaan karakteristik, mekanisme pengelolaan, serta tujuan dari kedua program tersebut menimbulkan kebutuhan untuk dikaji secara komprehensif sebagai alternatif tabungan jangka panjang masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan program DPLK dan BPJS Ketenagakerjaan dalam perannya sebagai instrumen tabungan jangka panjang.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode deskriptif komparatif, melalui teknik pengumpulan data berupa studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, laporan resmi lembaga terkait, serta literatur ilmiah yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPLK dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki perbedaan mendasar dalam aspek kepesertaan, fleksibilitas iuran, pengelolaan dana, serta mekanisme dan bentuk pemberian manfaat. DPLK memberikan keleluasaan yang lebih besar dalam perencanaan dana pensiun sesuai kebutuhan individu, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menekankan fungsi perlindungan sosial yang bersifat wajib dengan manfaat yang terstandarisasi. Dengan demikian, kedua program tersebut memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi dalam sistem perlindungan hari tua guna mendukung kesiapan finansial masyarakat pada masa pensiun.

Kata kunci: Dana Pensiun, DPLK, BPJS Ketenagakerjaan, Tabungan Jangka-panjang, Perencanaan Keuangan

## Abstract

Pension funds constitute one of the financial instruments that play an important role in supporting public welfare during retirement, making long-term financial planning increasingly relevant. In Indonesia, pension

programs are administered through various schemes, including Financial Institution Pension Funds (Dana Pensiun Lembaga Keuangan/DPLK), which are voluntary in nature, and BPJS Employment as part of the national social security system through the Pension Security Program and Old-Age Security Program.

Differences in characteristics, management mechanisms, and objectives between these programs create a need for a comprehensive examination of their roles as alternative long-term savings instruments for society.

This study aims to analyze and compare DPLK pension fund programs and BPJS Employment in their roles as long-term savings instruments. The research employs a qualitative descriptive approach with a descriptive-comparative method, using data collected through a literature review of relevant laws and regulations, official institutional reports, and academic literature.

The findings indicate that DPLK and BPJS Employment differ fundamentally in terms of membership characteristics, contribution flexibility, fund management, and the mechanisms and forms of benefits provided. DPLK offers greater flexibility in retirement planning according to individual needs, while BPJS Employment emphasizes mandatory social protection with standardized benefits. Therefore, these two programs serve different yet complementary roles within the old-age protection system in supporting the financial preparedness of society during retirement.

Keywords: Pension Funds, DPLK, BPJS Employment, Long-term Savings, Financial Planning

## 1. Pendahuluan

Perencanaan keuangan jangka panjang merupakan aspek fundamental dalam menjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menghadapi masa pensiun. Masa pensiun umumnya ditandai dengan penurunan produktivitas dan pendapatan, sementara kebutuhan hidup cenderung tetap atau bahkan meningkat, terutama yang berkaitan dengan biaya kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, ketersediaan dana pensiun yang memadai menjadi faktor krusial guna menjamin keberlanjutan kualitas hidup masyarakat di hari tua. (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Urgensi perencanaan dana pensiun semakin meningkat seiring dengan bertambahnya angka harapan hidup dan perubahan struktur demografi yang mengarah pada penuaan penduduk (*aging population*). Kondisi ini menuntut adanya sistem jaminan sosial dan instrumen tabungan jangka panjang yang tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga inklusif dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (Rokhim et al., 2022; Hutajulu & Lahuddin, 2025). Namun, pada kenyataannya, tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia masih relatif terbatas, khususnya dalam hal pemahaman mengenai instrumen tabungan dan perlindungan jangka panjang. Rendahnya pemahaman ini berdampak pada minimnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan keuangan jangka panjang secara mandiri.

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah Negara Republik Indonesia telah menyediakan program jaminan sosial melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Program ini dirancang sebagai sistem jaminan sosial nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Program ini

bertujuan memberikan perlindungan dasar serta kepastian pendapatan pada saat peserta memasuki usia pensiun atau menghadapi risiko kerja tertentu (BPJS Ketenagakerjaan, 2023; BPJS Ketenagakerjaan, 2024). Dana yang dihimpun dikelola secara kolektif dengan prinsip kehati-hatian dan pengawasan negara, sehingga diharapkan mampu memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para pesertanya.

Di sisi lain, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) hadir sebagai alternatif program dana pensiun yang bersifat sukarela dan dikelola oleh lembaga keuangan, seperti bank dan perusahaan asuransi. DPLK menerapkan sistem iuran pasti yang memberikan fleksibilitas lebih tinggi kepada peserta dalam menentukan besaran kontribusi, pilihan strategi investasi, serta perencanaan dana pensiun sesuai dengan tujuan keuangan dan profil risiko masing-masing individu. (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Karakteristik ini menjadikan DPLK sebagai instrumen yang potensial bagi masyarakat yang menginginkan perencanaan dana pensiun yang lebih optimal dan berbasis kebutuhan personal.

Meskipun BPJS Ketenagakerjaan dan DPLK memiliki tujuan yang sama, yaitu menyediakan dana sebagai penopang kesejahteraan di masa pensiun, keduanya memiliki perbedaan mendasar dari aspek kepesertaan, pengelolaan dana, tingkat fleksibilitas kontribusi, manfaat yang diberikan, serta risiko yang melekat. (Rokhim et al., 2022). Perbedaan karakteristik tersebut berimplikasi pada efektivitas dan daya tarik masing-masing program sebagai alternatif tabungan jangka panjang bagi masyarakat. Kurangnya pemahaman komparatif terhadap kedua program ini berpotensi menyebabkan masyarakat memilih instrumen dana pensiun yang kurang sesuai dengan kebutuhan finansial jangka panjang mereka.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi perbandingan antara program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai alternatif tabungan jangka panjang masyarakat. Melalui analisis perbandingan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai keunggulan dan keterbatasan masing-masing program, sehingga dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam menentukan pilihan program dana pensiun yang paling sesuai, serta memberikan masukan bagi pemangku kebijakan dalam upaya pengembangan dan penyempurnaan sistem jaminan pensiun nasional.

## **2. Tinjauan Teoretis dan Literatur Keuangan**

Dana pensiun merupakan lembaga keuangan yang mengelola iuran peserta guna memberikan manfaat pensiun pada saat peserta memasuki usia pensiun atau memenuhi persyaratan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dana pensiun didefinisikan sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Tujuan utama penyelenggaraan dana pensiun adalah menjamin kesinambungan penghasilan bagi individu setelah tidak lagi produktif secara ekonomi. (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Secara teoretis, dana pensiun berfungsi sebagai instrumen *deferred consumption*, yaitu mekanisme penundaan konsumsi pada masa produktif untuk memenuhi kebutuhan pada masa tidak produktif. Dalam konteks ini, dana pensiun juga berperan dalam meningkatkan stabilitas sistem keuangan melalui

penghimpunan dana jangka panjang yang dapat diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan. (Rokhim et al., 2022).

Perencanaan keuangan jangka panjang berkaitan erat dengan *Life-Cycle Hypothesis (LCH)* yang dikemukakan oleh Modigliani dan Brumberg (1954). Teori ini menjelaskan bahwa individu merencanakan pola konsumsi dan tabungan sepanjang siklus hidupnya, dengan menabung pada masa produktif dan menggunakan tabungan tersebut pada masa pensiun. Dana pensiun, baik DPLK maupun BPJS Ketenagakerjaan, merupakan implementasi nyata dari teori ini dalam sistem keuangan modern.

Selain itu, teori *Permanent Income Hypothesis* yang dikemukakan oleh Friedman (1957) menekankan pentingnya pendapatan jangka panjang dalam menentukan keputusan konsumsi dan tabungan. Dengan demikian, dana pensiun berfungsi untuk menjaga kestabilan pendapatan permanen individu setelah memasuki masa pensiun.

Program jaminan pensiun merupakan bagian dari sistem jaminan sosial yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap risiko sosial-ekonomi, khususnya penurunan pendapatan akibat usia lanjut. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan jaminan sosial dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang mengatur sistem perlindungan bagi tenaga kerja melalui berbagai program jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan, 2023; BPJS Ketenagakerjaan, 2024).

Program pensiun wajib seperti BPJS Ketenagakerjaan dirancang untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failure*), seperti rendahnya kesadaran menabung dan keterbatasan akses terhadap instrumen keuangan. BPJS Ketenagakerjaan melalui program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) menekankan prinsip solidaritas sosial, gotong royong, serta kepesertaan wajib, yang membedakannya dengan sistem pensiun berbasis pasar (Rokhim et al., 2022).

Pengelolaan dana pensiun tidak terlepas dari prinsip-prinsip investasi, khususnya teori *portofolio modern* yang dikemukakan oleh Markowitz (1952). Teori ini menekankan pentingnya diversifikasi aset untuk meminimalkan risiko dan mengoptimalkan tingkat pengembalian (*risk-return trade-off*).

Dalam praktiknya, DPLK menawarkan berbagai pilihan portofolio investasi, seperti deposito, obligasi, reksa dana, dan saham, sehingga peserta dapat menyesuaikan profil risiko dengan preferensi dan *horizon* investasi masing-masing. Sebaliknya, pengelolaan dana BPJS Ketenagakerjaan cenderung lebih konservatif karena mengutamakan keamanan dana dan kepentingan perlindungan sosial jangka panjang (Rokhim et al., 2022).

DPLK merupakan program dana pensiun yang diselenggarakan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa dan bersifat sukarela. DPLK memberikan fleksibilitas dalam hal besaran iuran, usia pensiun, pilihan investasi, serta bentuk manfaat pensiun. Secara konseptual, DPLK mencerminkan pendekatan *individual retirement saving*, di mana tanggung jawab perencanaan dan pengelolaan risiko lebih besar berada pada individu peserta (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Dalam perspektif keuangan, DPLK dipandang sebagai instrumen tabungan jangka panjang yang juga berfungsi sebagai alat investasi, sehingga potensi hasil yang diperoleh sangat bergantung pada kinerja pasar

dan strategi pengelolaan dana. Sebaliknya, BPJS Ketenagakerjaan lebih menekankan aspek perlindungan sosial dengan tingkat kepastian manfaat yang lebih tinggi meskipun fleksibilitas dan potensi imbal hasil relatif lebih terbatas (Rokhim et al., 2022; Hutajulu & Lahuddin, 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa DPLK dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran yang saling melengkapi dalam sistem dana pensiun nasional. Namun demikian, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program dana pensiun sukarela masih menjadi tantangan utama, sehingga diperlukan peningkatan edukasi dan dukungan kebijakan untuk mendorong partisipasi masyarakat (Hutajulu & Lahuddin, 2025).

Sistem pensiun yang diselenggarakan oleh negara pada prinsipnya dirancang untuk memberikan perlindungan dasar pada masa pensiun, bukan untuk menggantikan seluruh pendapatan ketika individu tidak lagi bekerja secara produktif (Kurniawan, et al., 2021).

### 3. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena berfokus pada analisis kebijakan, karakteristik program, serta mekanisme pengelolaan dana pensiun yang secara konseptual tidak dapat direpresentasikan secara memadai melalui pengukuran kuantitatif. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat ataupun mengukur pengaruh antarvariabel, melainkan untuk memahami dan menjelaskan perbedaan struktural serta fungsional antara program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai alternatif tabungan jangka panjang masyarakat.

Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif mengenai aspek kepesertaan, iuran, pengelolaan dana, investasi, serta mekanisme pemberian manfaat pada masing-masing program dana pensiun. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menjelaskan karakteristik dan perbedaan mendasar antara DPLK dan BPJS Ketenagakerjaan dalam mendukung kesiapan finansial masyarakat pada masa pensiun.

Berdasarkan kerangka konseptual yang digunakan, dana pensiun dipahami sebagai instrumen perencanaan keuangan jangka panjang yang berlandaskan teori *Life-Cycle Hypothesis* yang dikemukakan oleh Franco Modigliani dan Brumberg (1954), teori *Permanent Income Hypothesis* oleh Friedman (1957), serta teori *Portofolio Modern* oleh Markowitz (1952). Ketiga pendekatan tersebut menjelaskan pentingnya tabungan, investasi, dan pengelolaan risiko dalam mempersiapkan kesejahteraan individu pada masa pensiun.

Dalam konteks Indonesia, DPLK dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan dua bentuk program dana pensiun yang memiliki karakteristik, mekanisme, dan tujuan yang berbeda (Otoritas Jasa Keuangan, 2015; Rokhim et al., 2022). Perbedaan tersebut menciptakan kebutuhan untuk dilakukan analisis komparatif guna memahami bagaimana masing-masing program berperan sebagai alternatif tabungan jangka panjang bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada perbandingan aspek-aspek utama kedua program untuk menilai kelebihan, keterbatasan, serta relevansinya dalam mendukung kesiapan finansial masyarakat di masa pensiun

**Bagan 3.1 Teori keuangan dan program dana pensiun sebagai alternaif Tabungan jangka Panjang**



Kerangka konseptual ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara teori keuangan dan program dana pensiun sebagai alternatif Tabungan jangka Panjang.

### 3. 1 Tabel Perbandingan DPLK dan BPJS Ketenagakerjaan

Aspek Perbandingan	DPLK	BPJS Ketenagakerjaan
Landasan Teoretis	Teori tabungan individu dan investasi	Teori jaminan sosial dan perlindungan sosial
Sifat Kepesertaan	Sukarela	Wajib
Tujuan Program	Perencanaan dana pensiun individu	Perlindungan sosial hari tua
Fleksibilitas Iuran	Fleksibel, sesuai kemampuan peserta	Ditentukan berdasarkan persentase upah
Pengelolaan Dana	Dikelola lembaga keuangan (bank/asuransi)	Dikelola oleh badan publik
Pilihan Investasi	Beragam, sesuai profil risiko	Relatif konservatif dan terstandarisasi
Risiko Investasi	Ditanggung peserta	Ditanggung bersama dalam sistem jaminan sosial
Bentuk Manfaat	Manfaat pensiun sesuai akumulasi dana	Manfaat pensiun/JHT sesuai ketentuan
Pendekatan Sistem	Market-based pension system	Social security system
Peran dalam Keuangan	Instrumen investasi jangka panjang	Instrumen perlindungan finansial dasar

Berdasarkan perbandingan teoretis tersebut, DPLK dan BPJS Ketenagakerjaan memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam sistem perencanaan keuangan jangka panjang masyarakat

### 4. Pembahasan

Secara umum, hasil analisis menunjukkan bahwa kesiapan finansial masyarakat pada masa pensiun dipengaruhi oleh integrasi program dana pensiun, tingkat literasi keuangan, pemanfaatan teknologi digital, serta dukungan kebijakan yang berorientasi pada keberlanjutan sistem perlindungan sosial. Dalam konteks Indonesia, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memiliki peran penting sebagai instrumen tabungan jangka panjang dan perlindungan sosial bagi masyarakat (Rokhim et al., 2022).

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara teori keuangan dengan keberadaan program dana pensiun sebagai bentuk tabungan jangka panjang. Konsep tersebut diawali dari teori perencanaan keuangan jangka panjang yang menekankan pentingnya persiapan finansial sejak usia produktif guna menghadapi penurunan pendapatan pada masa pensiun (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Selanjutnya, penelitian ini mengacu pada *Life-Cycle Hypothesis* yang dikemukakan oleh Modigliani dan Brumberg (1954), yang menjelaskan bahwa individu cenderung menabung pada masa produktif dan menggunakan tabungan tersebut pada masa tua. Dalam konteks ini, dana pensiun berfungsi sebagai instrumen yang membantu masyarakat melakukan tabungan secara terencana dan berkelanjutan.

Selain itu, *Permanent Income Hypothesis* yang dikemukakan oleh Friedman (1957) menjelaskan bahwa keputusan konsumsi dan tabungan dipengaruhi oleh ekspektasi pendapatan jangka panjang. Oleh karena itu, keberadaan program dana pensiun menjadi penting untuk menjaga stabilitas pendapatan individu setelah memasuki usia pensiun.

Dari perspektif investasi, pengelolaan dana pensiun berkaitan erat dengan teori *Portofolio Modern* yang dikemukakan oleh Markowitz (1952), yang menekankan pentingnya diversifikasi investasi untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian dan meminimalkan risiko. Dalam praktiknya, DPLK menawarkan fleksibilitas pilihan investasi yang lebih beragam dibandingkan BPJS Ketenagakerjaan, sehingga peserta dapat menyesuaikan strategi investasi dengan profil risiko dan tujuan keuangan masing-masing (Rokhim et al., 2022).

Salah satu permasalahan utama dalam sistem pensiun di Indonesia adalah keterbatasan manfaat pensiun yang diterima peserta apabila hanya mengandalkan satu program pensiun. Manfaat yang diberikan melalui program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) pada BPJS Ketenagakerjaan pada dasarnya dirancang sebagai perlindungan dasar, bukan sebagai pengganti penuh pendapatan pada masa pensiun (Otoritas Jasa Keuangan, 2015). Oleh karena itu, keberadaan DPLK menjadi penting sebagai instrumen pelengkap dalam meningkatkan kesiapan finansial masyarakat di masa tua.

Integrasi kebijakan antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan DPLK perlu didorong agar kedua program dapat saling melengkapi. DPLK dapat berfungsi sebagai tambahan tabungan pensiun bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga total pendapatan pensiun yang diterima menjadi lebih memadai. Pendekatan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kombinasi program pensiun wajib dan sukarela dapat meningkatkan keberlanjutan sistem pensiun nasional (Hutajulu & Lahuddin, 2026).

Literasi keuangan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program dana pensiun. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat jangka panjang dana pensiun menyebabkan sebagian pekerja masih memandang iuran pensiun sebagai beban pengeluaran, bukan sebagai bentuk investasi masa depan. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai dana pensiun perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui lembaga pendidikan, tempat kerja, maupun media publik (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Selain itu, digitalisasi layanan menjadi sarana yang efektif untuk memperluas cakupan kepesertaan dana pensiun, khususnya bagi pekerja sektor informal. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan masyarakat mengakses informasi, melakukan pendaftaran, dan membayar iuran dengan lebih mudah dan efisien. Penguatan layanan digital juga dapat meningkatkan efektivitas komunikasi publik mengenai manfaat dana pensiun sehingga mampu mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam program BPJS Ketenagakerjaan maupun DPLK (BPJS Ketenagakerjaan, 2024).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa dana pensiun memiliki peran penting sebagai alternatif tabungan jangka panjang bagi masyarakat. Integrasi program BPJS Ketenagakerjaan dan DPLK, peningkatan literasi keuangan, pemanfaatan digitalisasi, serta dukungan kebijakan yang berkelanjutan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesiapan finansial masyarakat di masa pensiun.

## 5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan finansial masyarakat pada masa pensiun berkaitan erat dengan perencanaan keuangan jangka panjang yang dilakukan sejak usia produktif. Berdasarkan teori *Life-Cycle Hypothesis* dan teori perencanaan keuangan, dana pensiun berfungsi sebagai instrumen tabungan jangka panjang yang membantu individu menjaga keberlanjutan pendapatan setelah tidak lagi bekerja secara produktif.

Dalam konteks Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) memiliki peran yang saling melengkapi dalam sistem pensiun nasional. BPJS Ketenagakerjaan berfungsi sebagai program jaminan sosial wajib yang memberikan perlindungan dasar, sedangkan DPLK berperan sebagai program sukarela yang memberikan fleksibilitas investasi dan tambahan pendapatan pada masa pensiun. Perbedaan karakteristik tersebut terlihat pada aspek kepesertaan, iuran, pengelolaan dana, investasi, dan manfaat pensiun yang diberikan.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa manfaat pensiun yang diperoleh apabila hanya mengandalkan satu program, khususnya BPJS Ketenagakerjaan, cenderung belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup pada masa tua. Oleh karena itu, keberadaan DPLK menjadi penting sebagai alternatif tabungan jangka panjang yang dapat meningkatkan kesiapan finansial masyarakat di masa pensiun.

Selain itu, tingkat literasi keuangan dan pemanfaatan digitalisasi layanan turut memengaruhi partisipasi masyarakat dalam program dana pensiun. Peningkatan edukasi keuangan, integrasi kebijakan antara BPJS Ketenagakerjaan dan DPLK, serta penguatan layanan digital menjadi faktor penting dalam memperluas kepesertaan dan mendukung keberlanjutan sistem pensiun nasional.

Dengan demikian, kesiapan finansial masyarakat di masa pensiun tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program dana pensiun, tetapi juga oleh pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang serta dukungan kebijakan dan sistem layanan yang efektif.

## Daftar Pustaka

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (2023). *Laporan tahunan BPJS Ketenagakerjaan*. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. (2024). *Profil program jaminan sosial ketenagakerjaan*. Jakarta: BPJS Ketenagakerjaan.
- Friedman, M. (1957). *A theory of the consumption function*. Princeton: Princeton University Press.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Buku saku dana pensiun: Konsep, sistem, dan peran dana pensiun dalam perlindungan hari tua*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan
- Kurniawan, N. H., Mahmudin, Y., and Hamidah. 2021. *Pengaruh dana pensiun dan niat pensiun terhadap produktivitas pekerja dengan intervening engagement pekerja DAPENMA-PAMSI pada enam provinsi di Pulau Jawa*.
- Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- Modigliani, F., & Brumberg, R. (1954). Utility analysis and the consumption function: An interpretation of cross-section data. In *Post-Keynesian economics*. New Brunswick: Rutgers University Press.
- Putri, I. A., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2025). Kinerja program jaminan kehilangan pekerjaan di Indonesia: Tinjauan literatur sistematis. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 20(2), 201–226.
- Rokhim, R., Adawiyah, W., & Faradynawati, I. A. A. (2022). The Indonesian pension system. In *Contributions to Management Science* (pp. 357–378). Springer.
- Hutajulu, L. B., & Lahuddin, B. (2025). *Kelayakan sistem jaminan pensiun Indonesia: Studi komparatif dengan Belanda dan Singapura*. *Jurnal Jamsostek*, 3(2), 227–252.  
<https://doi.org/10.61626/jamsostek.v3i2.83>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.